

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I ini berisikan pengantar mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta batasan masalah dan sistematika penulisan dari skripsi ini.

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keadaan lautan yang sangat luas dengan dua pertiga dari wilayahnya merupakan lautan. Indonesia memiliki total luas laut 5,8 juta km², garis pantai yang lebih dari 81.000 km², dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang lebarnya mencapai 200 mil [Wahyono, 2009]. Pemerintah Indonesia mulai menyadari akan adanya potensi yang bisa ditemukan dalam sektor perairan. Dalam upaya membangun dan mengembangkan potensi tersebut, pemerintah mulai melakukan berbagai cara untuk dapat melestarikan, menjaga, dan mengelola sumber daya alam serta potensi yang ada di maritim. Usaha tersebut diantaranya adalah membangun infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, dan modernisasi teknologi dan anggaran yang berkaitan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) [Zhafran, 2017].

Presiden Indonesia, Joko Widodo, pada tahun 2014 mengenalkan sebuah kebijakan yang disebut dengan Poros Maritim Dunia. Presiden Joko Widodo membuat pernyataan resmi dari kebijakan tersebut pada 13 November 2014 saat KTT Asia Timur ke-9 di Myanmar [Sekretariat Kabinet RI, 2014]. Pencanaan Poros Maritim Dunia menjadi misi untuk meningkatkan pembangunan kelautan, baik dari infrastruktur dan konektivitas maupun pengelolaan sumber daya laut. Melalui Poros Maritim Dunia, Presiden Joko Widodo memiliki ambisi untuk merealisasikan rencana terkait pembangunan kemaritiman Indonesia dan arah gerak kebijakan strategis mengenai kemaritiman nasional untuk mengoptimalkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia [Sari, 2014]. Selain itu, Poros Maritim Dunia juga memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk terlibat dalam kolaborasi regional dan global untuk kepentingan rakyatnya [Sobarini, 2021].

Dalam mendukung visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, tentunya diperlukan upaya diplomasi maritim terhadap negara lain, salah satunya adalah Australia. Hubungan diplomatik Indonesia dan Australia pertama kali dilakukan pada tahun 1949 dan dibuka secara penuh pada tanggal 17 Maret 1950 [Masela, 2019].

Perjalanan hubungan Indonesia dan Australia mengalami beberapa pasang surut dikarenakan latar belakang kondisi kedua negara tersebut berbeda, baik dalam hal kebudayaan, pembangunan, politik, maupun beberapa kepentingan lainnya. Selain itu, ketidakstabilan hubungan kedua negara juga disebabkan oleh kondisi geografis yang berdekatan sehingga menimbulkan rasa saling tidak percaya. Australia dalam 1987 *Defence White Paper* pernah menyebutkan bahwa Australia melihat Indonesia sebagai pintu ancaman untuk negaranya, sehingga dapat meningkatkan risiko keamanan bagi Australia [Parliament of Australia, 1987].

Dalam beberapa bidang hubungan Indonesia dan Australia juga memiliki hubungan yang erat, salah satunya adalah kemaritiman. Kondisi geografis Australia yang merupakan negara tetangga Indonesia dan berbatasan langsung dengan perairan Indonesia menjadi salah satu alasan mengapa kerja sama kemaritiman penting dilakukan. Indonesia juga menjadi pintu bagi Australia dalam mengakses perdagangan internasional maupun keamanan internasional. Selain itu, dari kaca mata Australia, melalui 2016 *Defence White Paper*, Australia akan meningkatkan keterlibatan pertahanan dengan negara-negara di Indo-Pasifik, termasuk peningkatan pelatihan dan pengembangan kapasitas [Australian Government, 2016]. Australia melihat kawasan Indo-Pasifik sebagai sebuah strategi bagi ekonomi maupun pertahanan dirinya dalam beberapa dekade terakhir ini [Scott, 2013]. Oleh karena itu, Australia melalui 2017 *Foreign Policy White Paper* menjadikan pembangunan sebagai fokus utama dengan adanya penguatan kemampuan dalam negeri, diplomasi, pertahanan, dan kerja sama dengan negara lain untuk memastikan kestabilan kondisi dunia [Australian Government, 2017]. Hal tersebut menjadi sebuah peluang terjalannya kerja sama Indonesia dan Australia dalam bidang kemaritiman untuk sama-sama menjaga kondisi perairan di sekitar kedua negara tersebut terhindar dari segala bentuk ancaman.

Visi Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia dapat dilakukan melalui diplomasi maritim. Diplomasi maritim Indonesia salah satunya mengarah pada Australia sebagai negara tetangganya. Dengan adanya diplomasi maritim yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Australia diharapkan akan meningkatkan keamanan maritim dan kekuatan maritim untuk menunjang jalannya visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Indonesia dan Australia juga sadar akan ketergantungan satu sama lain untuk mewujudkan kestabilan negara melalui keamanan dalam bidang kemaritiman.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana upaya diplomasi Indonesia terhadap Australia dalam mendukung visi Poros Maritim Dunia di era pemerintahan Joko Widodo?

C. Kerangka Teori

Diplomasi Maritim

Diplomasi merupakan bagian dari hubungan internasional yang tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan luar negeri suatu negara bangsa. Menurut Der Derian, diplomasi dapat didefinisikan sebagai ‘komunikasi antara orang asing’ [Derian, 2021]. Watson juga mendeskripsikan diplomasi sebagai ‘dialog antar negara’ [Watson, 1982]. Sedangkan, Viotti dan Kauppi menggambarkan diplomasi sebagai pengelolaan hubungan internasional melalui komunikasi untuk memasukkan negosiasi yang mengarah pada tawar-menawar atau kesepakatan [Viotti & Kauppi, 2001]. Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa diplomasi adalah seni bernegosiasi yang digunakan suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya terhadap negara atau pihak lain.

Menurut Barston yang telah dikutip oleh Djelantik Sukarwasini, diplomasi dapat didefinisikan sebagai tata kelola hubungan antar negara atau hubungan antara negara dan aktor hubungan internasional lainnya. Negara berusaha untuk menyampaikan, mengatur, dan menjaga kepentingan nasional melalui representatif resminya dan aktor lain, baik secara khusus atau melalui saluran yang lebih umum seperti afiliasi, diskusi informal, menyampaikan ide bersama, lobi, kunjungan, dan kegiatan lain yang masih terikat.

Definisi lain dari diplomasi mencakup tindakan yang mencerminkan kepentingan politik, militer, dan ekonomi bagi negara-negara yang terlibat dalam hubungan diplomatik. Tindakan-tindakan ini kemudian disusun dalam pertukaran permintaan dan peluang antara pihak-pihak yang berpartisipasi dalam negosiasi untuk memajukan kepentingan nasional mereka sendiri [Sukawarsini, 2008]. Salah satu kelanjutan khusus untuk metode diplomasi adalah dengan meningkatnya sejumlah aktivitas diplomasi, seperti kunjungan, negosiasi, pertemuan, dan penandatanganan perjanjian. Salah satu bentuk penting dalam perjanjian internasional adalah dengan adanya instrumen informal yang dipakai, seperti *Memoranda of Understanding* (MoU) dan *Gentlemen's Agreement* (GA). Penerapan perjanjian-perjanjian tersebut

merefleksikan peningkatan hubungan antara bidang-bidang dalam pemerintahan dengan aktor diplomasi pada tingkat internasional [Hermawan, 2007].

Diplomasi Maritim merupakan lanjutan dari teori diplomasi yang didasari pada negosiasi yang dilakukan untuk kepentingan yang berhubungan dengan perairan dan kemaritiman [Rijal, 2019]. Pengerahan angkatan laut, pasukan penjaga pantai, kemampuan kekuatan laut konsuler maritim suatu negara untuk mengumpulkan potensi hasil diplomatik juga termasuk dalam kategori diplomasi maritim. Diplomasi maritim juga dapat berfungsi sebagai ‘katup pengaman’ untuk mengurangi kemungkinan konflik, mencegah musuh, menetralsir ancaman, atau menyelesaikan perselisihan secara damai.

Menurut Christian Le Miere, diplomasi maritim merupakan manajemen dalam studi hubungan internasional melalui ranah maritim [Mière, 2014]. Selain itu, diplomasi maritim dapat dipahami melalui dua cara, yaitu (1) menggunakan alat kebijakan maritim yang berbeda, seperti Angkatan Laut dan Pasukan Penjaga Pantai, untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri termasuk inisiatif membangun kepercayaan dan citra, atau (2) proses penanganan atau penyelesaian masalah kemaritiman, seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau konflik garis batas landas kontinen dengan penggunaan metode diplomatik konvensional melalui diplomat. Sebagian besar studi tentang diplomasi maritim berfokus pada pemahaman yang pertama dan bukan yang kedua [Kraska, 2011].

Menurut Laksamana Muda TNI Agus Setiadji, Diplomasi Maritim juga dapat diartikan sebagai penggabungan dari konsep diplomasi dan negara maritim. Diplomasi dapat diartikan sebagai praktik atau cara bernegosiasi oleh seseorang yang menjadi representatif dari sebuah negara maupun organisasi. Sedangkan, negara maritim adalah negara yang dibatasi oleh air dan bergantung pada lautan untuk sebagian besar pasokan makanannya. Jadi, diplomasi maritim dapat dikatakan sebagai seni negosiasi atau diskusi yang dilakukan oleh negara atau pemain lain tentang batas-batas laut, pertahanan, dan kerja sama maritim [Setiadji, 2017].

Joko Widodo telah menyebutkan bahwa diplomasi maritim merupakan satu dari tujuh pilar utama agenda pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yang berbunyi: “*Menerapkan Diplomasi Maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan.*” [Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2014].

Diplomasi maritim memiliki tiga kategori, yaitu kooperatif, persuasif, dan koersif. Kooperatif dalam hal ini dapat diartikan sebagai bentuk kesukarelaan semua pihak yang terlibat, seperti Angkatan Laut dalam bakti sosial memberikan bantuan kepada negara yang terkena bencana [Setiawan & Zaman, 2020]. Selain itu, Christian Le Miere menggambarkan diplomasi maritim kooperatif dalam bentuk yang beragam, seperti *Humanitarian Assistance (HA)* atau *Disaster Response (DR)*, operasi gabungan keamanan maritim, *port calls* latihan gabungan, pertukaran anggota, dan pertemuan yang bersifat kolaborasi untuk membangun rasa saling percaya antarnegara [Mière, 2014].

Diplomasi maritim persuasif bertujuan untuk menguatkan pengakuan dari pihak lain terhadap kekuatan nasional suatu negara dengan menunjukkan kekuatan maritimnya dan meningkatkan reputasi bangsa di kancah internasional, seperti patroli *freedom of navigation*. Hal ini ditunjukkan untuk melawan musuh, namun bertujuan untuk mempengaruhi pihak lain terhadap kemampuan yang dipunya oleh negara tersebut secara persuasif. Diplomasi maritim persuasif identik dengan “*showing the flag*” dengan menghimpun elemen dari kekuatan maritim melalui pengibaran bendera di kapal angkatan laut [Mière, 2014]. Diplomasi maritim koersif dilakukan dengan menekankan pada penggunaan diplomasi dengan *hard power*. Penggunaan kekuatan angkatan laut dalam diplomasi ini ditunjukkan untuk menekan pihak oposisi [Kurniawan & Suproboningrum, 2017]. Salah satu cara yang serupa dengan diplomasi maritim koersif ini adalah diplomasi kapal meriam (*gunboat diplomacy*) [Mière, 2014]. Melalui personel angkatan laut, negara melakukan berbagai penyerangan, penembakan, penyergapan, dan tindakan mengancam lainnya terhadap setiap pihak yang dianggap melakukan pelanggaran di wilayah teritorial perairan negara tersebut. Diplomasi ini bertujuan untuk mencapai tujuan militer, memberikan peringatan kepada target, membangun kekuatan militer, dan memenangkan konflik [Rijal, 2019].

D. Hipotesis

Untuk mendukung visi sebagai Poros Maritim Dunia, Indonesia melakukan diplomasi maritim yang bersifat kooperatif terhadap Australia sebagai salah satu negara tetangganya yang sama-sama memiliki tujuan untuk menjaga keamanan maritim melalui kerangka kerja sama *Joint Declaration on Maritime Cooperation* di Sydney, Australia.

E. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami bagaimana Indonesia melakukan diplomasi maritim terhadap Australia sebagai upaya untuk mendukung visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia di era Presiden Joko Widodo.
2. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar sarjana dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

Penulis akan menggunakan teknik analisis data kualitatif dalam melakukan penelitian ini. Data akan diperoleh dengan Telaah Pustaka. Penulis akan memperoleh data dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, internet, dan berita yang relevan dengan pembahasan. Selanjutnya, data dan analisa yang terkumpul akan berdasarkan kumpulan fakta yang ada dan kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan yang lainnya dan ditarik sebuah kesimpulan menggunakan kerangka teori yang telah ditentukan.

G. Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis membahas tentang diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia terhadap Australia dalam upaya mendukung visi Poros Maritim Dunia. Batasan waktu yang digunakan untuk menjabarkan diplomasi Indonesia terhadap Australia adalah saat pemerintahan Joko Widodo tahun 2018 – 2022.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas empat bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan mencakup latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kondisi Maritim Indonesia

Pada bab ini akan membahas mengenai sejarah kemaritiman Indonesia, potensi dan tantangan Indonesia, dan peluang Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Bab

ini akan menjadi pengantar untuk melihat mengapa Indonesia melakukan upaya diplomasi maritim dengan negara lain.

BAB III : Diplomasi maritim Indonesia terhadap Australia

Bab ketiga akan membahas bagaimana Indonesia melakukan diplomasi maritim terhadap Australia untuk menunjang upaya mendukung visi sebagai Poros Maritim Dunia. Diplomasi maritim Indonesia terhadap Australia yang dimaksud adalah kerangka kerja sama *Joint Declaration on Maritime Cooperation* yang ditandatangani oleh Indonesia dan Australia di Sydney, Australia.

BAB IV : Penutup

Bab ini akan mencakup kesimpulan dari keseluruhan bab dari bab I, bab II, dan bab III, serta saran untuk penelitian selanjutnya.